



Menumbuhkan Budaya Bisnis Masyarakat: Kajian Pembiayaan Kredit Usaha Produktif di Kabupaten Kudus

Teguh Hadi Prayitno^{1,*}, Alimuddin Rizal², Musthofa³

¹Prodi Bisnis dan Manajemen Ritel Politeknik Kudus

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISBANK Semarang

³Anggota DPR RI Komisi XI dan Dosen Pascasarjana FEB UNISBANK

*Corresponding author: teguh_lip6@yahoo.com

Abstract. *This research, which was conducted in Kudus Regency, Central Java, photographed the condition of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) using a sample of 250 respondents. It evaluates the productive business credit program (KUP) that is being channeled to already running MSMEs. The KUP, which was initiated by the Kudus Regency Government together with banking and insurance institutions as credit guarantee institutions, has proven to be able to bridge the problems faced by MSMEs related to the difficulty of accessing capital. As a result, MSMEs increase their incomes, employment, and reduce bad loans in banks. The business culture of the community in Kudus Regency is an ancestral heritage existing long before the independence of the Republic of Indonesia which continues to thrive due to the increasing quality of MSMEs. The credit distribution with the KUP pattern has proven to be able to awaken the business culture of the community.*

Keyword:

MSMEs, culture, business, KUP, Kudus

Article Info

Received:

15 October 2021

Accepted:

6 December 2021

Published:

9 December 2021

1. Pendahuluan

Jumlah penduduk negara Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa (jumlah penduduk Indonesia 2021) [1]. Jumlah penduduk Indonesia tersebut merupakan data penduduk terbaru berdasarkan sinkronisasi hasil Sensus Penduduk 2020 dan data administrasi kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk perempuan mencapai 134.229.988 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 137.119.901 jiwa, serta ada 86.437.053 kartu keluarga. Banyaknya penduduk di Indonesia bisa direkatkan dalam semboyan nasional Bhineka Tunggal Ika (Kesatuan dalam Keragaman), hal itu mengacu pada komposisi beragam negara ini. Semboyan itu menunjukkan bahwa

biarpun masyarakat multikultural, ada perasaan kesatuan sejati di pikiran dan hati masyarakat Indonesia, meski sesungguhnya daerah-daerah di Indonesia memiliki budaya dan mengalami sejarah ekonomi yang dinamis dengan warna daerah masing-masing.

Keragaman budaya di berbagai daerah, menjadikan budaya Indonesia sangat berbeda dari budaya Barat, karena ada perbedaan dalam pengalaman perjalanan masyarakat, sistem keyakinan masyarakat, hierarki, agama, pengertian tentang waktu, hubungan sosial, dan banyak lagi yang membuat perbedaan. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang kompleks, oleh karena itu negara Indonesia menarik dari berbagai sisi. Aspek-aspek budaya dan dinamika suatu negara penting sekali diketahui, salah satunya bila ada investor yang akan melakukan investasi, wisatawan yang akan berkunjung, bahkan bila ada warga asing yang akan berniat untuk menetap di Indonesia, baik dengan pertimbangan bisnis, menempuh pendidikan maupun pertimbangan pribadi.

Griffin & Ebert (2005) menyebutkan bahwa substansi istilah bisnis merujuk pada organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga atau badan usaha yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba atau tujuan lain yang sesuai dengan visi misi bisnis tersebut. Ada beberapa batas-batas organisasi sebagai pemisah antara organisasi dan lingkungannya dalam bidang bisnis. Batas organisasi dapat dilihat berdasarkan kesibukan bisnis, para distributor produk atau jasa, dan pelanggan. Konsepsi bisnis tersebut sebagai rangkaian kegiatan yang terorganisir, yang dilakukan oleh produsen, pedagang, konsumen, dan industri dimana tempat usaha berada.

Sedangkan budaya bisnis satu negara tentu berbeda dengan negara lainnya. Bahkan budaya bisnis di masing-masing daerah dalam negara Indonesia, juga sangat berbeda-beda. Budaya bisnis dalam konteks ini adalah model atau gaya, yang mengilustrasikan norma-norma dan nilai-nilai yang diterima serta perilaku tradisional dari suatu kelompok masyarakat. Budaya bisnis yang dianut masyarakat suatu daerah tersebut, terus berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Salah satunya adalah budaya bisnis masyarakat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang tidak bisa lepas dari budaya yang bersumber dari istilah *GusJiGang*. Filosofi *GusJiGang* dilihat dari makna kata adalah, *Gus* (yang berarti anak bagus atau bagus budi pekertinya), *Ji* (yang berarti pintar *ngaji* atau taat beribadah), dan *Gang* (yang berarti pandai berdagang). Istilah *GusJiGang* yang diajarkan oleh Sunan Kudus kepada masyarakat, agar masyarakat di Kudus mempunyai budi pekerti yang bagus atau baik, bisa mengaji atau rajin beribadah serta pandai berdagang.

Dengan semangat *GusJiGang* yang menjadi dasar budaya bisnis itulah, tidak mengherankan apabila banyak pelaku bisnis di Kudus bukan hanya didominasi industri besar berskala nasional dan internasional saja, tetapi juga banyak bisnis yang berbasiskan keluarga berkembang dengan pesat. Usaha keluarga yang berkembang di Kudus itu merupakan bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Kelenturan UMKM dalam berbagai terpaan badai krisis ekonomi, menjadi salah satu potensi bahwa UMKM dapat menjadi tumpuan perekonomian nasional. Bila merujuk pada Faustine (2001) dalam Tsamenyi et al. (2008) [2], bisnis keluarga di Indonesia menyumbang hampir 82% dari Gross National Profit. (Tsamenyi et al, 2008). Termasuk juga kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga UMKM tidak bisa dipandang remeh dalam pencatatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, peningkatan keunggulan dan kontribusi UMKM menjadi bagian penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, agar budaya bisnis di tengah masyarakat semakin meningkat.

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Undaan, Kecamatan Kota, Kecamatan Bae, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Mejobo, yang terdiri dari 123 desa, dan 9 kelurahan (Kudus dalam angka, 2016). Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus yang tersebar di desa / kelurahan adalah 10.048 UMKM, sedangkan jumlah UMKM yang telah dibina oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM adalah 13.200 UMKM (Bappeda Kudus, 2016). Selain memerlukan pembinaan dari instansi terkait, UMKM juga memerlukan pinjaman untuk menjalankan usahanya serta mengembangkan usahanya agar berkembang dari mikri menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah. Banyak lembaga perbankan yang dapat memberikan pinjaman langsung kepada pelaku usaha, dengan berbagai persyaratan yang ketat atau bankable (memenuhi persyaratan bank untuk mendapatkan kredit usaha. Tetapi dalam prakteknya tidak semua pelaku UMKIM dapat dengan mudah bisa mengambil pinjaman perbankan tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tidak semua pelaku UMKM memiliki agunan sebagai salah satu syarat mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, kendala yang dihadapi pelaku UMKM tersebut harus dicarikan jalan keluar, diantaranya yaitu kehadiran pemerintah agar budaya bisnis di masyarakat Kudus terus berjalan dan berkembang dengan baik. Dalam skala lokal, kehadiran pemerintah adalah keterlibatan Pemkab Kudus dalam mengatasi problematika pembiayaan kredit UMKM.

2. Metode Penelitian

Selain memiliki kelebihan, UMKM juga memiliki kelemahan seperti minimnya modal, pengelolaan keuangan yang tidak efisien dan tidak efektif, kurangnya inovasi, manajemen waktu, legalitas usaha, belum memaksimalkan digital marketing. Kelemahan lainnya yang dihadapi UMKM adalah produktivitas yang rendah (Susilo, 2005) [3], hal ini terkait dengan berbagai sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki UMKM, yaitu: 1) Faktor Pendidikan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia; 2) Kemampuan Manajerial; 3) teknologi, akses pasar; 4) dan kemampuan sumber pembiayaan (permodalan) (Susilo, 2010; Hafsa, 2004) [4]. Dalam penelitian ini persoalan permodalan akan menjadi titik utama pembahasan, yaitu bagaimana UMKM bisa mengakses permodalan agar budaya bisnis di masyarakat Kudus semakin tumbuh.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. yang dilakukan melalui perhitungan ilmiah dan berasal dari sampel orang-orang atau masyarakat yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Merujuk Moleong (2005) [5], penelitian kuantitatif yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, motivasi, perilaku, tindakan, dan lain-lain secara holistik, serta melalui deskripsi dalam bentuk rangkaian kata, kalimat dan bahasa, dalam konteks alami khusus dan dengan menggunakan metode alami.

Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (Kuncoro, 2009) [6]. Teknik pengumpulan data selanjutnya yang digunakan adalah melalui wawancara,

yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Emzir, 2010) [7]. Pada hakikatnya wawancara merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang suatu masalah atau tema yang diangkat dalam penelitian. Selama wawancara mendalam, mendengarkan, mencatat atau merekam setiap narasi yang disampaikan oleh narasumber, serta menangkap inti dari jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan probing yaitu menggali terus jawaban yang disampaikan narasumber sampai mendapatkan jawaban yang lengkap, dan apabila jawaban kurang lengkap maka peneliti kembali lagi pada narasumber dan melakukan tambahan wawancara.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode riset yang digunakan untuk memperjelas gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain sebuah penelitian yang lebih luas dalam penggunaan data-datanya, serta analisa yang panjang dari ujung awal sampai akhir. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara detail yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalamannya kepada menentukan rencana dan keputusan di masa depan (Hasan, 2002) [8]. Metode ini juga merupakan metode analisis yang mengidentifikasi karakteristik fenomena yang diamati atau mengeksplorasi kemungkinan hubungan dua fenomena atau lebih (Leedy & Ormrod, 2005) [9].

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta PP No. 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 20 Tahun 2008 memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap UMKM. Dengan regulasi yang telah dikeluarkan tersebut, pembangunan UMKM merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Upaya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan Pemkab Kudus, diharapkan bisa membuat pelaku UMKM meningkat kesejahteraannya, serta memberikan iklim yang kondusif budaya bisnis daerah tersebut. Sektor usaha kecil dan menengah daerah ditargetkan sebagai andalan penopang perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor, apalagi kelompok ini dinilai mampu bertahan pada saat krisis ekonomi terjadi. UMKM tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, termasuk di Kudus Jawa Tengah.

Penelitian dengan jumlah 250 responden, yang diperoleh dari para pelaku UMKM di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang tersebar di 9 kecamatan ini, dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2018. Berdasarkan hasil kajian terdapat beberapa peluang dan ancaman, kekuatan dan kelemahan, bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kudus, termasuk implementasinya di bidang perbankan, yaitu sebagai berikut (**tabel 1**):

Tabel 1. SWOT ANALYSIS /KEKEPAN UMKM DIKABUPATEN KUDUS

STRENGTH /KEKUATAN	WEAKNESSES/KELEMAHAN
Pelaku Bisnis di wilayah ini, jumlah terbesar adalah UMKM, serta jenis usahanya beragam	Pelaku UMKM mayoritas berpendidikan rendah

Pelaku UMKM memiliki kelebihan yaitu keahlian khusus (seperti membatik, seni ukir, menyulam, bordir, makanan khas daerah, kerajinan, dan lain-lain).	Dari sisi kreativitas terbatas.
UMKM memiliki kelenturan dalam menjalankan bisnisnya atau lebih fleksibel	Modal keuangan terbatas, terutama kendala dalam mengakses lembaga keuangan
Untuk mendapatkan bahan baku relatif mudah, karena berasal dari lokal / nasional (domestik) jadi tidak begitu terguncang jika terjadi perubahan kurs mata uang, serta krisis ekonomi secara global.	Aksesnya atau lokasi produksi UMKM relatif jauh dari pusat perdagangan.
OPPORTUNITY/PELUANG	THREATS/ANCAMAN
Situasi kamtibmas di Kudus relative aman, mendukung kondusifitas iklim bisnis	Penggunaan teknologi informasi belum maksimal atau terbatas, sehingga efisiensi rendah
UMKM yang dikerjakan pelaku lokal, lebih paham dengan lingkungan sekitar bisnis.	Keterbatasan pembinaan UMKM
Biaya investasi relatif murah	Produk impor banyakyang masuk, akibatliberalisasiperdagangan
Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki dukungan yang sangat tinggi terhadap pengembangan UMKM.	Permintaan investor asing dan domestik lebih tinggi; menjadikan konsumen semakin kritis dan memiliki preferensi
Tenaga kerja cukup banyak dan murah serta tidak terlalu peka terhadap masalah, atau tidak banyak protes	Kualitas yang masih rendah dari para pelaku UMKM
Pembangunan sejumlah infrastruktur baik di Kabupaten Kudus maupun Jawa Tengah sebagai kelanjutan dari Program MP3EI. (jalan provinsi, jalantol, dan fasilitas lainnya).	Bisnis asing lebih inovatif, dengan dukungan modal, teknologi, dan jaringan bisnis yang luas

Sumber: Di Elaborasidan Analisis untuk Studi ini, 2019.

Budaya bisnis yang sudah berkembang jauh sebelum kemerdekaan dengan filosofi *GusjiGang* menjadi modal semangat para pelaku UMKM untuk terus bangkit dan berkembang. Namun masih banyak kelemahan dalam konteks kompetensi dan pengetahuan pelaku usaha, sehingga kreativitasnya masih terbatas dan harus senantiasa dilakukan kreatifitas baru. Termasuk diberi bimbingan teknis dan manajerial. Selanjutnya dari kondisi dan situasi tersebut, dengan posisi Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats bagi UMKM banyak kelemahan dan keterbatasan dalam hal akses modal dan pasar.

Terkait permodalan, sebagian besar UMKM mengeluhkan sulitnya mendapatkan modal dari perbankan. Penyebabnya antara lain, kurangnya informasi yang diterima UMKM, prosedur pinjaman bank sering kali memakan waktu (UMKM menganggap berbelit-belit), tidak ada agunan. Hingga saat ini masih terdapat perbedaan persepsi antara UMKM dan perbankan, terutama terkait kelayakan kredit. UMKM memiliki usaha yang prospektif dan

menguntungkan (*feasible*), namun secara *bankable* belum layak dilakukan karena kurangnya agunan, atau agunan yang dimiliki kurang untuk menutupi risiko kredit. Menurut Bharti dan Shylendra (2011) yang dikutip oleh Emmanuel (2012) [10], akses permodalan sangat penting dalam mengembangkan usaha, khususnya usaha mikro. Senada dengan itu, Simtowe dan Phiri (2007) dan Muktar (2009) yang dikutip oleh Emmanuel (2012) [11], menyatakan kredit sebagai prasyarat bagi pertumbuhan perusahaan.

Berdasarkan fenomena empiris tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus mengeluarkan kebijakan program Kredit Usaha Produktif (KUP) bekerjasama dengan Bank Jateng. Kredit Usaha Produktif (KUP) ini adalah kredit usaha bagi UMKM yang mempunyai usaha produktif dan sudah berjalan dengan skema penjaminan yang selanjutnya disebut Kartu KUP UKM. Pembiayaan atau kredit melalui program KUP bukan sekedar program untuk menghabiskan anggaran, karena sumber keuangannya bukan dari APBD maupun APBN. Sehingga orang yang mengaku memiliki usaha, kemudian mengajukan pinjaman KUP sudah dapat dipastikan akan ditolak atau tidak akan lolos menerima pinjaman. Program KUP dengan tujuan 1) Mendukung penguatan permodalan pelaku UMKM 2) Meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha; 3) pemberian bimbingan administrasi, penagihan dan pemantauan. Dengan program KUP tersebut muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran dengan memperluas lapangan kerja.

Kekhasan dari KUP adalah penerima pinjaman pada sektor usaha produktif tanpa agunan, Bunga 0,9% per bulan, maksimal kredit sesuai kriteria mulai dari maksimal Rp. 5 juta, Rp. 10 juta, Rp. 15 juta dan Rp. 20 juta, pertanggungjawaban penjaminan untuk sektor mikro sebesar 85% dari nilai pinjaman dengan Biaya Jasa Penjaminan sebesar 2,85%. Keistimewaan lainnya adalah tidak ada biaya dan tidak ada pembelian materi yang dibebankan kepada UMKM. Pelibatan unsur pemerintah dari tingkat paling bawah hingga SKPD teknis menjadi bukti bahwa negara hadir dalam mendorong iklim budaya bisnis di Kabupaten Kudus.

Lembaga yang terlibat dalam program Kredit Usaha Produktif dari tingkat yang paling rendah yaitu RT/RW, Kepala Desa / Lurah dan Camat, SKPD /BAPEDA, Bank Jateng, lembaga penjamin (Jamrindo/Askrindo). Keterlibatan unsure pemerintah dalam proses penyaluran kredit kepada UMKM di Kabupaten Kudus itulah yang tidak banyak dilakukan di pemerintah daerah lainnya. Sehingga UMKM yang akan mengajukan pinjaman sudah dapat dipastikan merupakan pelaku usaha yang riil, bukan papan nama yang hanya sekedar ingin mendapatkan pinjaman.

Proses pengajuan KUP sebenarnya tidak sulit (**tabel 2**), asalkan pelaku usaha memang benar-benar menjalankan kanbisnisnya dengan benar. Pelibatan unsur RT/RW yang mendata pelaku usaha adalah garda terdepan dalam melakukan seleksi awal, atau memastikan bahwa UMKM yang akan mengajukan pinjaman kredit itu adalah memang benar-benar pelaku usaha. Bukan UMKM yang usahanya tidak jelas, tidak berkualitas dan tidak memiliki rekam jejak yang baik. Apabila data UMKM telah didapatkan, maka RT/RW membawanya kekelurahan/desa setempat. Setelah selesai di tingkat kelurahan/desa, direkapitulasi dan disahkan oleh pihak kecamatan.

Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai unsure pemerintah yang langsung mengetahui kondisi riil pelaku UMKM di wilayahnya, termasuk rekam jejaknya baik integritas personal maupun kualitas produk yang dihasilkannya menjadi garda terdepan dalam melakukan seleksi. Karena data yang dibawa pihak kelurahan/desa adalah hasil dari pengajuan UMKM atas sepengetahuan RT/RW setempat. Peran dan tanggungjawab KepalaDesa/Lurah dan

Camata ntara lain ;

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM tentang keberadaan KUP didampingi oleh RT/RW setempat.
2. Menghimpun data dan memonitor langsung usaha riil UMKM di tingkat desa/kelurahan
3. Mengidentifikasi kelayakan usaha dari UMKM yang akan mengajukan pinjaman KUP
4. Menyerahkan data UMKM yang mengajukan pinjaman kepada SKPD terkait.

Unsur pemerintah lainnya yang terlibat dalam seleksi kelayakan UMKM calon penerima KUP adalah satuan kerjap erangkat daerah atau SKPD, yang pada tahun 2021 istilah itu menjadi organisasi perngkat daerah (OPD). Tugas dari SKPD dalam proses pengajuan, seleksi calon penerima KUP adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun data pelaku UMKM yang dikirim dar ikecamatan
2. Memferivikasi data pelaku UMKM yang akan mengajukan pinjaman KUP
3. Memberikan rekomendasi UMKM calon penerima KUP kepada Bank Jateng
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM yang menerima pinjaman KUP

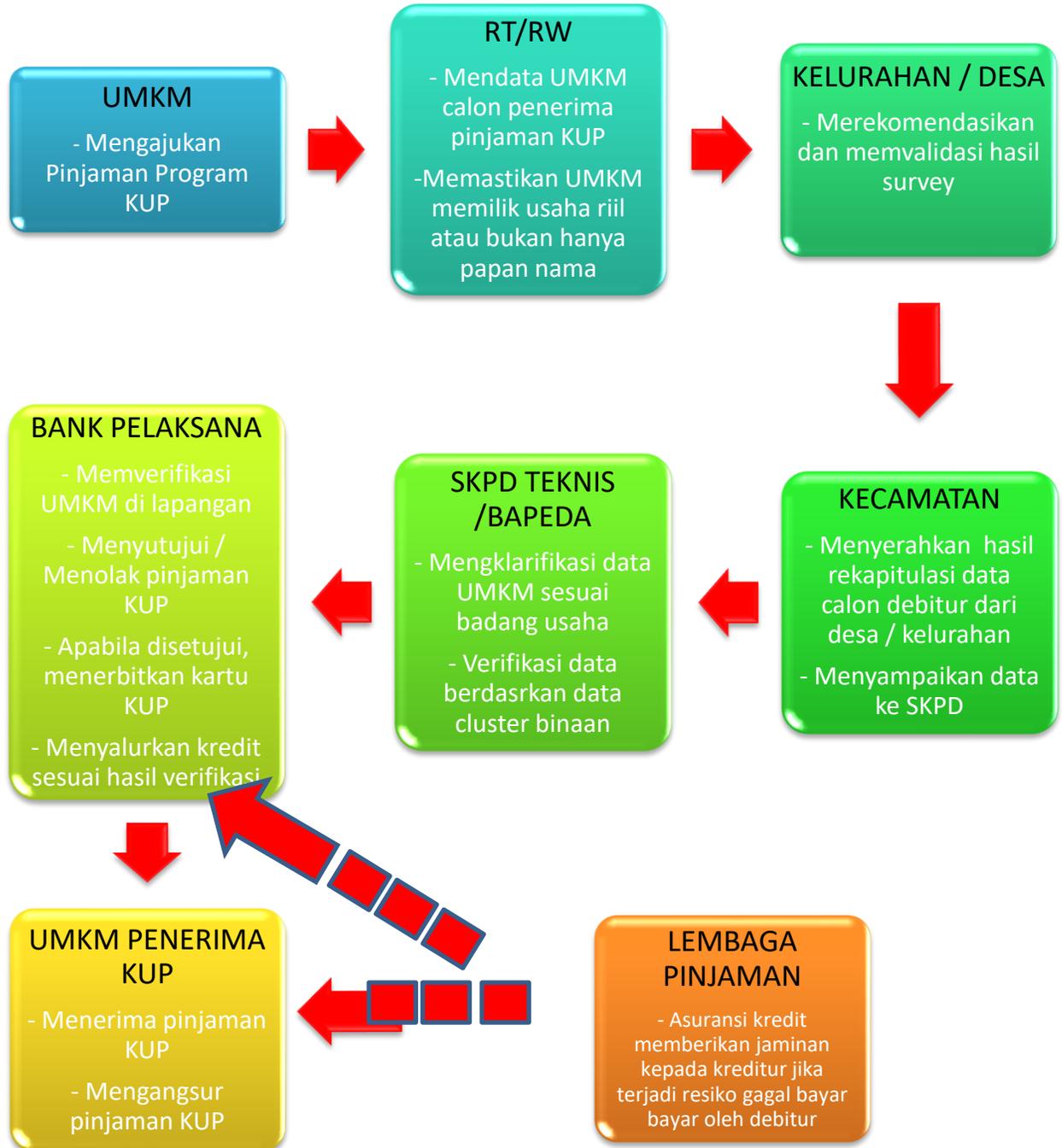
Bank Jateng selaku lembaga keuangan pemberi pinjaman, akan menyalurkan pinjaman setelah data terveriviasi dari unsure pemerintah dari banwah hingga SKPD. Seperti lazimnya lembaga perbankan lainnya, dalam program KUP, Bank Jateng memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan analisa (layak/tidak layak)
2. Menetapkan UMKM penerima pinjaman KUP dan menentukan besarnya plafond kredit
3. Membuat dan melakukan perjanjian kredit dengan UMKM penerima pinjaman KUP
4. Mengeluarkan peringatan penagihan pembayaran, apabila terjadi penunggakan.

Sedangkan lembaga penjamin dalam hal ini Jamkrindo / Askrindo memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menjamin KUP mikro sesuai peruntukan
2. Asuransi kredit memberikan jaminan kepada kreditur jika terjadi resiko gagal dbayar oleh debitur

Tabel 2. ALUR PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN PINJAMAN KUP



Peran aktif seluruh pemangku kepentingan tersebut, membuat program KUP berjalan efektif dan jumlah penerima kredit KUP semakin meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari bertambahnya jumlah debitur dari bulan Maret 2018 hingga Desember 2018. Perkembangan Kredit Usaha Produktif di Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagai berikut (tabel 3):

**Tabel 3. PERKEMBANGAN PENYALURAN KUP DI
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018**

Bulan	Plafond (Rp.)	Debitur	Pertumb Plafond (%)
Maret	35.000.000	3	-
April	616.000.000	59	1660,00
Mei	1.395.000.000	126	126,46
Juni	1.722.000.000	159	23,44
Juli	2.084.000.000	204	21,02
Agustus	2.690.000.000	272	29,08
September	4.228.000.000	457	57,17
Oktober	5.079.000.000	547	20,13
Nopember	6.046.000.000	657	19,04
Desember	6.694.000.000	720	10,72

Sumber: Data diolah, 2019

Sedangkan jumlah debitur yang pada bulan Maret 2018 sebanyak 3 (tiga) debitur dengan plafon kredit hanya mencapai 35 juta rupiah, tumbuh pesat dipenghujung tahun 2018 dengan plafon mencapai 6,7 miliar rupiah, dengan jumlah 720 debitur. Kenaikan jumlah debitur yang cukup signifikan, membuat budaya bisnis di Kabupaten Kudus semakin berkembang pesat, yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.724 orang. Oleh karena itu program penyaluran KUP kepada pelaku usaha UMKM sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Jumlah debitur, besarnya plafon pinjaman, dan penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dalam **(tabel 4)** sebagai berikut ;

**Tabel 4. PLAFOND KREDIT, DAN PREDIKSI PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN KUDUS**

Plafon	Debitur	Tenaga Kerja (orang)	Penyerapan naker (orang)
Rp. 1.000.000 s.d . Rp. 5.000.000	255	1 - 2	382
> Rp. 5.000.000 s.d . Rp. 10.000.000	287	3 - 4	1.004
> Rp. 10.000.000 s.d. Rp. 15.000.000	88	5 - 7	528
> Rp. 15.000.000	90	8 - 10	810
Jumlah	720		2.724

Sementara itu, Portofolio KUP pada pesektor 2018 di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa informasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari pertumbuhan KUP baik dalam jumlah debitur maupun jumlah kredit. Per Agustus 2017, jumlah debitur adalah 1.378 debitur dengan plafon kredit Rp 12,99 miliar dan saldo pinjaman sebesar Rp 5,7 miliar

Portofolio KUP atau yang disebut juga sebagai KUP Mikro Bank Jateng berjalan dengan bagus, data di Bank Jateng Cabang Kudus per sektor yang sudah tersalurkan, dengan jumlah debitur 1.378, dengan plafond Rp. 12.990.000.000, serta outstanding 5.796.763.246. Sektor yang paling banyak menyerap kredit adalah perdagangan eceran, manufaktur, komunikasi dan jasa lanjutan serta restoran diikuti oleh sektor Perikanan dan Peternakan, hal itu dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

1. Sektor Industri yang meliputi perngrajin logam, tahu dan tempe sebanyak 351 debitur, dengan plafond Rp. 3.597.200.000, sedangkan outstandingnya adalah Rp. 1.998.952.881
2. Sektor perikanan, peternakan (kambing, ayam) sebanyak 100 debitur, dengan plafond Rp. 892.800.000, sedangkan outstandingnya adalah Rp. 98.655.610
3. Sektor perdagangan eceran (toko kelontong, sembako, pakan ternak, kue, sangkar burung) sebanyak 467 debitur, dengan plafond Rp. 4.941.200.000, sedangkan outstandingnya adalah Rp. 2.530.447.534
4. Sektor rumah makan / warung makan dan restoran sebanyak 219 debitur, dengan plafond Rp.1.612.600.000, sedangkan outstandingnya adalah Rp. 468.256.154
5. Sektor jasa dan komunikasi (bubut kayu, penjahit, salon, bengkel) sebanyak 231 debitur, dengan plafond Rp. 1.946.800.000, sedangkan outstandingnya adalah Rp. 700.451.067

4. Simpulan

Budaya bisnis masih tumbuh subur di masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, antara lain terlihat dari pertumbuhan UMKM. Meski UMKM mampu bertahan di tengah krisis, namun masih ada faktor yang mempengaruhi lambatnya perkembangan usaha, termasuk akses sumber permodalan. Untuk menumbuhkan iklim usaha UMKM yang kondusif, pemerintah daerah harus memiliki program yang dapat mengangkat harkat dan martabat pengusaha UMKM, terutama yang relatif belum memiliki akses ke lembaga keuangan. Terkait permodalan, sebagian besar UMKM mengeluhkan sulitnya mendapatkan modal dari bank, sehingga pemerintah daerah harus melakukan terobosan, diantaranya dilakukan oleh Pemkab Kudus dengan program Kredit Usaha Produktif (KUP). Penyaluran kredit dengan pola KUP itu terbukti mampu membangkitkan budaya bisnis masyarakat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Ketika WHO menetapkan Covid 19 sebagai pandemi global, kontraksi ekonomi tidak bisa dihindarkan. Pandemi menyebabkan pertumbuhan ekonomi regional menyusut sebesar 0,5 persen pada paruh pertama tahun 2020. Tekanan keuangan yang berkepanjangan diperkirakan juga masih terjadi di sebagian besar sektor (Fernandes, 2020). Bahkan hingga pertengahan tahun 2021 pandemi Covid 19 juga masih terus berlangsung, yang masih membuat sektor ekonomi mengalami kelesuan, termasuk UMKM. Pandemi Covid 19 memukul UMKM lebih dari kondisi krisis keuangan tahun 2008, terutama menurunnya daya beli masyarakat (OECD, 2020). Strategi agar UMKM mampu

bertahan di tengah Pandemi Covid 19, khususnya dari sisi permodalan alangkah baiknya pemerintah daerah kembali menerapkan Kredit Usaha Produktif atau KUP yang saat ini (2021) di Kabupaten Kudus sudah tidak ada lagi.

Referensi

- [1] Kompas. 2021. Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta. Jakarta : Kompas.com
- [2] Tsamenyi, Mathew, I. Noormansyah, and S. Uddin. 2008. *Management controls in family-owned businesses (FOBs): A case study of an Indonesian familyowned University*. Accounting Forum, Vol. 32: 62-74.
- [3] Sri Susilo, Y. 2005. Strategi Survival Usaha Mikro Kecil (Studi Empiris Pedagang Warung Angkringan di Yogyakarta). Telaah Bisnis, Vol.6, No.2, hlm.161-178.
- [4] Hafsah, M.J. 2004. Upaya Pengembangan UKM. Infokop. Nomor 25 Tahun 2004, 40 – 44. Diaksesdari [http:// www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) padatanggal 8 September 2010.
- [5] Moleong,L.,2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Roasdakarya.
- [6] Kuncoro, M. 2008. Write Off Kredit UMKM. Kedaulatan Rakyat. 10 Desember 2008. Diaksesdari [http:// www.mudrajad.com](http://www.mudrajad.com) pada tanggal 30 Oktober 2010.
- [7] Emzir,2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- [8] Hasan,i.M.,2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- [9] Leedy, P.D. &Ormrod, J.E. 2005. Practical Research: Planning and Design, 8th Edition, Pearson Education Pte., Singapore.
- [10] Emmanuel,O.I.I.&O.K.,2012. Assessmentof the Contribution of Micro Finance Institutions (MFIs) to Sustainable Growthof Smalland Medium Scale Enterprises (SMEs) in Nigeria. *Interdisciplinary Journal ofContemporary Research InBusiness*,3(9),pp.1099-1110.
- [11] Emmanuel,O.I.I.&O.K.,2012. Assessmentof the Contribution of Micro Finance Institutions (MFIs) to Sustainable Growthof Smalland Medium Scale Enterprises (SMEs) in Nigeria. *Interdisciplinary Journal ofContemporary Research InBusiness*,3(9),pp.1099-1110.
- [12] Acquaaah, Moses. 2013. “Management control systems, business strategy and performance: A comparative analysis of family and non-family businesses in a transition economy insub-Saharan Africa”. Journal of Family Business Strategy, Vol. 4: 131-146.
- [13] Anonim. 2004. Pengkajian Usaha Mikro di Indonesia. *Himpunan Abstrak Hasil Penelitian Koperasidan UKM*. Diaksesdari <http://www.smedec.com> pada tanggal 23 Januari 2008.
- [14] Bastian,B.e.a.,2007.*Mari Membangun Usaha Mandiri*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [15] Bank Jateng, Laporan Perkembangan KUP, 2017.
- [16] Christriyati Arini, Sumintarsih, Siti Munawaroh. *Gusjigang : Etos Kerja dan Perilaku Ekonomi Pedagang Kudus*. 2016. Yogyakarta : Balai Pelestari Nilai Budaya.
- [17] Fernandes, N. (2020). Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVID 19) On The World Economy. Available at SSRN3557504.
- [18] Griffin, R. W., & Ebert, R. J. (2005). *Bisnis Ed. Ke-7*. Jakarta: Indeks.
- [19] Hubeis,M.,2009.*Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor : Galia Indonesia.

- [20] Pemkab Kudus, 2017. Semarang; Materi Seminar Kredit untuk UMKM.
- [21] Robinson, M.S., 2001. *The Microfinance Revolution, Sustainable Finance for the poor*, Washington, D.C : The World Bank.
- [22] Rudjito, 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan, Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia. *ArtikelTh*, II (1).
- [23] Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [24] Sulistyono-Basuki, 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- [25] Sumaryanto, 2010. *Mengenal Kewirausahaan*. Semarang : PT. Sindur Press.
- [26] Idris, I. 2006. Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Untuk Pemberdayaan UKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, No.2 Tahun I, hlm.99-105. Kantor Bank Indonesia Yogyakarta. 2010.
- [27] Kuncoro, M. 2008. Write Off Kredit UMKM. Kedaulatan Rakyat. Diakses pada laman <http://www.mudrajad.com> pada tanggal 30 Oktober 2010.
- [28] Sekaran, U. & Bougie, R. 2010. *Research Method for Business: A Skill Building Approach*, 5th Edition, John Wiley and Sons Inc., USA.
- [29] Setyari, N.P.W. 2005. *Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana: Working Paper..
- [30] Sri Susilo, Y. & Sutarta, A.E. 2004. Masalah dan Dinamika Industri Kecil Pasca Krisis Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1, hlm.65-78.
- [31] Subandi, S. 2007. Potensi Pengembangan Permodalan UMKM Dari Pinjaman Perbankan. Diakses dari laman <http://www.smedec.com>
- [32] Tambunan, T.T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [33] Zain, H.M.Y., Fattah, S., Djauhariah, L., Siswadharna, B., Mustari, B., & Tadjibu, M.J. 2007. Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi Selatan. Diakses dari laman <http://www.smedec.com>